

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Hampir semua industri, termasuk pemerintahan menggunakan kemajuan teknologi untuk membantu mengelola pemerintah dan memberikan pelayanan yang baik. Teknologi juga memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi. Informasi yang didapatkan dapat secara mudah dan praktis dengan adanya kemajuan teknologi saat ini. Ketika masyarakat menginginkan informasi yang akurat dan terpercaya, maka akan lebih mudah untuk mendapatkan informasi tersebut. Indonesia mempermudah masyarakatnya dalam memperoleh informasi pada era reformasi ini.

Di era digitalisasi yang sedang berlangsung di Indonesia saat ini, masyarakat menuntut agar pemerintah dapat memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah dan otonomi daerah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa asas otonomi daerah membuat masyarakat meningkatkan tuntutan terhadap pemerintah untuk menjalankan pemerintahan yang baik. Akibatnya, tuntutan ini mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan negara. Laporan keuangan harus dilakukan secara transparansi dan akuntabilitas dalam rangka menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Oleh karena itu, diperlukan prinsip-prinsip yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya untuk memperkuat pelaksanaannya. Ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah.

Pemerintah daerah diharapkan dapat menyediakan data pemerintahan daerah yang meliputi pembangunan serta keuangan daerah. Hal ini sudah tercantum UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir melalui UU No 9 Tahun 2015. Menggantikan Permendagri No 98 Tahun 2018, kini ditetapkanlah ketentuan penerapan berbentuk Permendagri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Untuk itu perihal pelaporan keuangan pemerintah menggunakan situs web berupa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau yang disingkat dengan SIPD (Lazuardi dkk., 2024).

SIPD digunakan pada informasi anggaran tahun 2020 hingga tahun 2023, kemudian berubah ke versi terbaru mengganti nama menjadi SIPD RI pada tahun 2024, yang dikelola langsung oleh pusat. SIPD RI adalah sebuah sistem yang dikembangkan sebagai penerapan teknologi yang digunakan dan diwujudkan. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD RI) dirancang oleh Kemendagri dengan tujuan untuk memperbaiki alur pengelolaan dokumen rencana pemerintahan daerah, agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good government*). SIPD RI dirancang dalam bentuk aplikasi web dalam memudahkan pengelola keuangan untuk dapat akses dengan mudah tanpa perlu download aplikasi secara langsung. Penerapan aplikasi berbentuk web ini bertujuan untuk meningkatkan serta memudahkan percepatan dalam pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelayanan publik dalam bidang keuangan.

Kebijakan ini bertujuan untuk menyediakan fasilitas dan mendorong terbentuknya sistem data serta informasi pembangunan, keuangan, dan pemerintahan lainnya, yang berguna untuk pengambilan keputusan di tingkat daerah maupun pusat.

Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah melalui kolaborasi berbasis teknologi, sehingga mampu membangun database daerah yang menggambarkan potensi dan sumber daya yang ada, serta mendukung pengembangan sistem informasi pengelolaan daerah yang valid dan akurat.

Kebijakan mengenai penggunaan SIPD diberlakukan sejak 29 September 2019 dan harus diterapkan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Indonesia. Salah satu pemerintah daerah yang telah menerapkan aplikasi SIPD yakni Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat merupakan instansi pemerintahan yang melaksanakan urusan bidang keuangan dan telah menggunakan SIPD RI sejak awal tahun 2024 menggantikan SIPD yang berlaku pada tahun 2020-2023 dan sebelumnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat menggunakan SIPKD. Sejak diterapkannya SIPD RI, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat mengalami beberapa peningkatan dan penurunan. Salah satu keunggulannya yang paling mencolok adalah kemampuan untuk melakukan perencanaan kapan saja dan di mana saja asalkan terhubung dengan internet.

SIPD RI merupakan inovasi yang mengintegrasikan berbagai proses pengelolaan keuangan, mulai dari tahap perencanaan hingga pengawasan, dengan tingkat integrasi yang tinggi. Namun, penerapan SIPD RI juga menimbulkan beberapa masalah bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, salah satunya terkait dengan infrastruktur server yang terdapat di pusat. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat rentan terhadap gangguan jaringan yang tidak stabil karena ketergantungannya pada server pusat. Ketika masalah ini muncul,

proses perencanaan dan penganggaran serta pelaporan keuangan dapat terhambat. Seharusnya, penerapan aplikasi berbentuk web ini bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah dalam pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelayanan publik pemerintah khususnya di Provinsi Sumatera Barat, namun dalam menjalankan program ini tidak lah mudah harus memerlukan kerjasama dan kerja keras dari setiap instansi yang terlibat, berdasarkan observasi awal penulis menemukan beberapa kendala dalam pengaplikasian dalam menggunakan sistem informasi pemerintahan daerah pada pelaporan keuangan daerah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan penulis diatas, penulis tertarik untuk membahas judul tugas akhir yaitu **“Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) dalam Proses Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jabarkan diatas, maka penulis akan membahas tentang :

1. Bagaimana implementasi aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) dalam proses akuntansi dan pelaporan keuangan daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dalam implementasi aplikasi Sistem Informasi

Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) dalam proses akuntansi dan pelaporan keuangan beserta dampaknya?

3. Apa saja upaya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dalam mengatasi hambatan implementasi aplikasi Sistem Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) dalam proses akuntansi dan pelaporan keuangan daerah?

### 1.3 Tujuan Penulisan Tugas Akhir

Adapun tujuan dilakukannya penulisan tugas akhir sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana cara implementasi aplikasi SIPD RI dalam proses akuntansi dan pelaporan keuangan daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.
- b. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dalam implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) dalam proses akuntansi dan pelaporan keuangan beserta dampaknya.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dalam mengatasi hambatan dalam implementasi aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) dalam proses akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
- d. Untuk mengembangkan potensi diri terhadap informasi yang di dapat sebagai bekal memasuki dunia kerja yang sesungguhnya.
- e. Untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan.

- f. Untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Ahli Madya Program Studi DIII Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas.

#### 1.4 Manfaat Penulisan Tugas Akhir

Manfaat yang penulis peroleh sebagai berikut :

- a. Menambah wawasan terkait cara implementasi aplikasi SIPD RI dalam proses akuntansi dan pelaporan keuangan daerah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.
- b. Dapat meningkatkan kemampuan yang dimiliki selama masa perkuliahan, serta menambah pengalaman kerja penulis sebelum memasuki dunia kerja.
- c. Dapat melatih public speaking dan etika di dunia kerja.

#### 1.5 Metode Pengumpulan Data

Langkah penting dalam mengetahui metode pengumpulan data dalam penulisan tugas akhir yang penulis lakukan adalah observasi, dokumentasi, dan wawancara.

Ketiga metode ini digunakan oleh penulis dalam penulisan tugas akhir ini yaitu :

- a. Observasi

Penulis melakukan pengamatan dan pengumpulan data secara langsung ke lapangan pada saat penulis magang di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat. Metode ini dapat digunakan untuk memperoleh data akurat tentang bagaimana cara pengaplikasian yang benar yang sesuai dengan peraturan yang berlaku pada aplikasi SIPD RI dalam proses akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.

- b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah proses pengumpulan data dari dokumen-dokumen resmi yang sudah ada. Dokumen yang digunakan biasanya mencakup laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya. Dokumentasi juga berguna memastikan adanya kepatuhan terhadap aturan keuangan yang berlaku, serta mengidentifikasi perbaikan apa saja yang diperlukan untuk pelaporan keuangan tahun berikutnya.

c. Wawancara

Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan pegawai bagian keuangan yang terlibat dalam proses akuntansi dan pelaporan keuangan daerah serta para pegawai yang terkait dengan bagian keuangan. Serta memberikan pertanyaan terbuka tentang bagaimana cara pengaplikasian SIPD RI sudah berjalan dengan baik, atau masih terdapat kendala, serta solusi yang dapat diambil ketika terjadinya kendala dalam proses pelaporan keuangan daerah.

## 1.6 Sistematika Penulisan

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan tugas akhir, manfaat penulisan tugas akhir, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini menjelaskan beberapa teori yang digunakan dan segala pembahasan terkait judul yang diajukan oleh penulis.

### **BAB III : GAMBARAN UMUM DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SUMATERA BARAT**

Bab ini menjelaskan gambaran umum instansi yang terdiri dari sejarah Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Barat, profil instansi, visi, misi, tugas pokok dan fungsi bidang-bidang pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, serta struktur organisasi.

### **BAB IV : PEMBAHASAN**

Bab ini menggambarkan dan menjelaskan data-data yang didapatkan oleh penulis di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, yaitu tentang bagaimana implementasi pengaplikasian SIPD RI dalam proses akuntansi dan pelaporan keuangan serta apa saja hambatan-hambatan yang terjadi serta solusi apa saja yang dapat dilakukan terkait dengan hambatan yang terjadi pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Barat.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari penulisan proposal magang dan saran untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat sebagai bahan pertimbangan guna untuk perbaikan dalam penelitian selanjutnya.

